

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIMULAN KE -2

No	Elemen Strategi Pencapaian Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja							Keuangan			
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Setor	Target Triwulan 1	Realisasi	(%)	Program	Pago	Realisasi	(%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Indeks Pelayanan Publik	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Mutu/itas Kelas Pengabdian Sistem Pemerintahan (SMIP)	Tingkat	0	0	0.00				
			2	Meningkatkan efektivitas proses APF dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapasitas APF	Level	0	0	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERAWASAN	23.119.789	12.919.040	55.89
					Indeks Efektivitas Pengabdian Masyarakat (EMPO)	Indeks	0	0	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERAWASAN	34.851.430	13.133.130	38.51
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PERAWASAN	32.412.832	4.580.000	14.01
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PERAWASAN	51.521.920	13.779.950	26.75
										PROGRAM PENUNJANG KEBERHAJAN, PENJAMPUTAN DAN ASISTENSI	20.913.000	4.944.100	23.62
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PERAWASAN	51.591.780	16.820.500	32.27
										PROGRAM PENUNJANG KEBERHAJAN, PENJAMPUTAN DAN ASISTENSI	19.459.480	5.171.961	26.58
										PROGRAM PENUNJANG URUPAY PERSEKUTUAN DAERAH KAMPUNGAN/KOTA	7.233.208.810	3.470.899.100	48.07

B. FAKTOR PENDUKUNG

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan indikatornya adalah Level Mutu Pelayanan Publik Pengabdian dalam Penyelenggaraan (LMP3) dan faktor pendukungnya : Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Penyelenggaraan Layanan Pemerintah (telah direspon Tim Satgas BPP di Level Ponds dan Tim Pengabdian Mula di Level Ponds Damsy, telah dilaksanakan monitoring terhadap keterlaksanaan Rencana Tindak Pengabdian (RTP) kemudian di Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan penyusunan skema RTP Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas perintah Gubernur Organisasi dan Tata Kerja (GOTK), telah dilakukan penyusunan dalam penilaian mandiri BPP dan dukungan pembiayaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam persiapan implementasi BPP di pemerintah daerah.

Meningkatnya efektivitas peran BPP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Level Kapabilitas BPP (Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan faktor pendukungnya adalah ketersediaan dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian kapabilitas BPP (telah dilaksanakan upaya pemenuhan Kapabilitas BPP Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tanggal 2 Februari sampai dengan 7 Maret 2025 serta kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah)
2. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan Korupsi (IEPK) (Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan faktor pendukungnya adalah telah dilaksanakan sosialisasi peningkatan pemahaman anti korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tanggal 8 Mei 2025 dan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan melalui dan program pengabdian masyarakat di lingkungan pemerintahan daerah.

Meningkatnya kinerja insentif

Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Insentif dan faktor pendukungnya : Adanya partisipasi pengabdian layanan dalam meningkatkan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (telah dilaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat oleh pengabdian layanan Insentif sejak Triwulan I dan masih berlanjut di Triwulan II).

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan indikatornya adalah Level Mutu Pelayanan Publik Pengabdian dalam Penyelenggaraan (LMP3) dan faktor pengambatnya : Keterbatasan pemahaman aparatus mengenai BPP dan keterbatasan pemenuhan mandiri, keterbatasan keterlaksanaan data dan dokumen pendukung, baik karena belum terdapatnya dengan baik maupun belum diperbaiki, sehingga proses verifikasi penilaian menjadi lebih lama, kemudian dan keterlaksanaan waktu pejabat atau tim BPP pengabdian daerah, yang menyebabkan koordinasi, komunikasi, dan penyediaan penilaian mandiri tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Meningkatnya efektivitas peran BPP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Level Kapabilitas BPP (Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan faktor pengambatnya adalah proses penilaian masih berlangsung sehingga hasil dari penilaian Kapabilitas BPP belum dapat diketahui pada Triwulan II, Terjadi perubahan metode dan kriteria penilaian sesuai regulasi terbaru yaitu Peraturan BPP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas BPP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga terjadi penyesuaian dalam proses penilaian dan berdasarkan hasil diskusi dari BPP terdapat potensi permasalahan nilai Kapabilitas BPP karena perbedaan kuantitas level dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.
2. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan Korupsi (IEPK) (Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan faktor pengambatnya adalah Penilaian IEPK belum dilaksanakan sesuai dengan Triwulan II karena proses penyelenggaraan penilaian mandiri baru dilaksanakan pada Triwulan II dan kemudian penyediaan data pendukung dari pemerintah daerah sebagai bagian dari proses penilaian.

Meningkatnya kinerja insentif

Belum terdapat data capaian yang sampai dengan Triwulan II dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Insentif dan faktor pengambatnya : Proses pengumpulan data survei masih berlangsung hingga Triwulan II dan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara periodik dan hasil akhir baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah seluruh data survei terkumpul.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan II) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Menindaklanjuti hasil penilaian Kapabilitas APIP yang akan ditetapkan oleh BPKP, Melakukan identifikasi area perbaikan berdasarkan hasil evaluasi penilaian kapabilitas APIP dan Menyusun langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2020 (sudah dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman ke APIP oleh Inspektur di Triwulan I dan penilaian mandiri di Triwulan II).
2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan II) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri IEPK kepada perangkat daerah pada Triwulan III (sesuai rencana yang telah tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan/PKPT Tahun 2026), Mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan II dengan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan tindak lanjut di Triwulan berikutnya adalah Melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan Inspektorat hingga Triwulan III, Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan layanan dan merumuskan solusi perbaikan pelayanan, dan Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas layanan berdasarkan hasil survei dan pembahasan FGD.



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MULYANTO, S.E.
 Jabatan Pelapor : Sekretaris
 Nama Pimpinan yang Melakukan Movev : MARDIANTO, S.E.
 Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kinerja Inspekturat	IRM Inspekturat	1	Tersampainya tertib pelaporan administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	%	100	100	100.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	7.322.206.616	3.476.999.108	48.07
					Nilai Kematangan Organisasi Inspekturat	Angka	0	0	0.00				
					Nilai SAKIP Inspekturat	Angka	81	80.10	98.89				
					Jumlah Inovasi Inspekturat	Angka	1	0	0.00				
			1.1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	%	16	33	206.25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.927.000	1.470.000	76.28
			1.2	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	100.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.692.929.956	3.301.341.854	49.33
			1.3	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase layanan administrasi BMD	%	40	20	50.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	462.500	0	0
			1.4	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.080.000	51.615.236	42.28

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Isi Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Skala	Target Tahun 2013	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1,5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perantara daerah	Peningkatan layanan administrasi umum perantara daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100,00	Administrasi Umum Perantara Daerah	124.782.810	28.171.480	24,33
			1,6	Peningkatan jasa perantara daerah sesuai dengan kebutuhan perantara daerah	Peningkatan jasa perantara umum perantara daerah sesuai dengan kebutuhan perantara daerah	%	80	80	100,00	Peningkatan Jasa Perantara Umum Perantara Daerah	144.672.000	74.102.239	48,93
			1,7	Peningkatan jasa perantara umum perantara daerah	Peningkatan perantara umum perantara daerah yang dilaksanakan	%	37	30	81,08	Peningkatan Jasa Perantara Umum Perantara Daerah	114.342.350	36.298.329	31,89

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENGUSAHA UTAMA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan Capaian 100% : Adanya komitmen baik kerja dalam membangun layanan berbasis *smart* untuk. Berkomitmen yang baik untuk pengabdian kinerja dengan pejabat struktural dan staf penyusun laporan serta Pemantauan kinerja pelayanan kinerja yang mencakup proses monitoring dan pengumpulan data.
2. Nilai Kemampuan Organisasi Inspektoral (Belum dapat dilihat capaiannya di Terasan II tahun 2026 karena belum ada realisasinya) : Terselenggaranya regulasi dan pedoman terkait penilaian kemampuan organisasi dan dukungan pimpinan dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi Inspektoral.
3. Nilai SATIS Inspektoral dengan capaian 93,89% : Terselenggaranya pembinaan *performance* dan pelaksanaan kinerja sebagai bagian dari implementasi RAKP dan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja.
4. Jumlah Inspeksi Inspektoral (Belum ada laporan yang terakumulasi sampai dengan Terasan II tahun 2026) : Adanya dukungan pimpinan tertinggi yang terakumulasi terakumulasi di Himpunan Inspektoral dan Terselenggaranya bidang pengembangan laporan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah

Menyediakan data dan analisis pimpinan sehingga capaian realisasi rencana target di Terasan II karena adanya penerapan perubahan untuk melakukan perubahan atas dokumen perencanaan RITP (Rencana Tidak Penganggaran) Tahun 2026 sebagai pengendalian atas perubahan BOKH di Tahun 2026 di Terasan II dan pengalihan penganggaran Perubahan Kerja Tahun 2026

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ketersediaan data, dokumen, dan informasi dengan perubahan dan analisis dari pimpinan sehingga Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat terlaksana di Terasan II Tahun 2026

Administrasi Rancang Baku Daerah pada Perangkat Daerah

Menyediakan data dan informasi yang baik serta analisis pimpinan sehingga kegiatan dan Administrasi Rancang Baku Daerah pada Perangkat Daerah di Terasan II dalam pemantauan RMD Terakumulasi dan realisasi RMD Terasan IV Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar

Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah

Menyediakan data, informasi yang baik, serta analisis pimpinan sehingga kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah di Terasan II tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar

Administrasi Daerah Perangkat Daerah

Ketersediaan data, informasi dan analisis dari pimpinan sehingga pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat terlaksana sesuai realisasinya di Terasan II tahun 2026

Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Menyediakan data, informasi dan analisis pimpinan sehingga kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk penyediaan SPK Parah Waduk dan penyediaan listrik, air, telepon di Terasan II tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar

Pemeliharaan Rung Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rung Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Pementasan Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan Capaian 100% : Masih terdapat potensi keterlambatan pelaporan apabila terjadi pergantian personel pengelola laporan dan Ketergantungan pada kelengkapan data dari unit kerja terkait. 2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat (Belum dapat diukur capaiannya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 karena belum ada realisasinya) : Penilaian kematangan organisasi belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan Ketersediaan data dukung dan dokumen penilaian masih dalam proses pengumpulan. 3. Nilai SAKIP Inspektorat : Masih terdapat beberapa capaian kinerja selama setahun yang belum tercapai sesuai targetnya sehingga capaian kinerja atas penilaian AKIP belum tercapai sesuai targetnya. 4. Jumlah Inovasi Inspektorat (Belum ada inovasi yang tercatat sampai dengan Triwulan II tahun 2026) : Proses perumusan inovasi masih dalam tahap identifikasi dan pengembangan dan Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengembangan inovasi pada awal tahun.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tidak ada faktor penghambat krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat berjalan lancar
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan lancar
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial di Triwulan II Tahun 2026
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tidak terdapat penghambat yang krusial sehingga kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat terlaksana di Triwulan II tahun 2026
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terlaksana di Triwulan II tahun 2026
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Masih terdapat penundaan aktivitas pemeliharaan mebel yang belum terlaksana sesuai rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah dengan Capaian 100% : Mempertahankan kedisiplinan pelaporan melalui monitoring berkala, Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada pengelola pelaporan kinerja dan Melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas laporan kinerja yang disampaikan.
2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat (Belum dapat diukur capaiannya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 karena belum ada realisasinya) : Mempersiapkan dokumen dan data dukung yang diperlukan untuk penilaian kematangan organisasi, Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penilaian dan Persiapan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran pada periode yang telah ditetapkan.
3. Nilai SAKIP Inspektorat : Melanjutkan implementasi AKIP di Triwulan berikutnya agar penilaian AKIP tahun berikutnya meningkat.
4. Jumlah Inovasi Inspektorat (Belum ada inovasi yang tercatat sampai dengan Triwulan II tahun 2026) : Mengidentifikasi potensi inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Mendorong partisipasi pegawai dalam pengembangan inovasi dan Menyusun dan mengusulkan inovasi untuk diimplementasikan pada periode berikutnya.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Triwulan III tahun 2026 atas finalisasi perubahan renja tahun 2026 dan persiapan penyusunan renja tahun 2027

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Triwulan III tahun 2026

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan ke bawah terkait penyusunan dokumen atas rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) atas Triwulan II 2026 di Triwulan III Tahun 2026

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Triwulan III tahun 2026

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Triwulan III tahun 2026

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Triwulan III tahun 2026

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Triwulan III tahun 2026



Wonogiri, 30 Juni 2026

Sekretaris

MULYANTO, S.E.
196806181993031010

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEKAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2016

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :
 Jabatan Pelapor :
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monet :
 Jabatan Pimpinan Pelapor :

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
 Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
 MARDIANTO, S.E
 Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Isi dan Momen Kegiatan	Indikator Kinerja	Setiap	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIT dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIT	1	Menerumuskan kebijakan penyelenggaraan atau kebijakan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kepengangan	Persentase Mula-kiri rekrutmen dan hasil program	%	80	67.57	78.87	PROGRAM PERKUALIFIKASIAN PEKAWAI	61.601.780	16.120.500	27.27
		Indeks Efektivitas Pengendalian Keuangan (IEPK)	2.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai dengan pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dihindarkan resiko pengawasan tahunan	%	50	75	150.00	Pengembangan Program Internal	17.686.780	6.225.000	35.20
			2.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan monev dari lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dihindarkan resiko pengawasan tahunan	%	64	81	112.95	Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.018.000	10.895.500	24.75

No	Rencana Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Struktur Program dan Memonor Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Minimalkan kualitas pendampingan dan sistem	Persentase perangkoit daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangka daerah dan pengisian keagilaan	%	100	100	100.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KESEKIAN, PERKAWAN DAN AMSTIAN	19.459.484	5.171.961	24.00
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengurusan berbasik risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengurusan Berbasik Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengurusan dan Perilaku Pengurusan	1.000.170	0	0
			2.2	Tersedianya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengurusan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengurusan tahunan	%	20	40	200.00	Pendampingan dan Asistensi	18.459.318	5.171.961	28.02
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengurusan berbasik risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengurusan Berbasik Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengurusan dan Perilaku Pengurusan	1.000.170	0	0
			2.2	Tersedianya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengurusan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengurusan tahunan	%	20	40	200.00	Pendampingan dan Asistensi	18.459.318	5.171.961	28.03

B. FAKTOR PENDUKUNG

INDUKTOR PERKEMBANGAN PUSKAWAS

Indikator Perumusan tidak lanjut sebagaimana hasil pengurusan dan Capaianya sampai dengan Trivulan II adalah 57,57%. Kemudian faktor pendukungnya adalah tersedianya regulasi dan mekanisme pelaksanaan tidak lanjut hasil pengurusan dan dukungan dalam monitoring tidak lanjut pemerintahan yang sebagaimana, pemerintahan (MMP/Kabupaten Integritas Monitoring Mekanisme Pengurusan).

PROGRAM PENYUMBARAN KETAJARAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dan monitoring rencana kerja tingkat lanjut 571 Tahun 2026 dengan faktor pendukung koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah lain yang terkait serta keterlibatan dan gerakan pimpinan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar di Trivulan II tahun 2026.

Pelaksanaan Pengurusan Internal

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengurusan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan koordinasi tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Pemajemukan Pengurusan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengurusan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan koordinasi tim. Meskipun mendapat tugas monitoring di luar pemerintahan yang telah dilaksanakan akan pengurusan hanya akan masyarakat tetap dapat terpenuhi sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Trivulan II Tahun 2026.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengurusan dan Fasilitas Pengurusan

Belum ada rencana pembuatannya di Trivulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Trivulan II Tahun 2026.

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengurusan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan koordinasi tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengurusan dan Fasilitas Pengurusan

Belum ada rencana pembuatannya di Trivulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Trivulan II Tahun 2026.

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengurusan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan koordinasi tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGHARAAN PEMERAWATAN

Indikator *Perencanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengurusan dan Capaiannya sesuai dengan Triwulan II mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan capaian Triwulan I, dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan II masih terdapat banyak rekomendasi hasil pengurusan yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan beberapa faktor penghambatnya sebagai berikut :*

1. Untuk penguatan Aspek Kinerja pada Program Penyelenggaraan Lain Tahun dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonorejo Tahun Anggaran 2024, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Wonorejo masih membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak lain termasuk dengan Bupati Wonorejo, pertimbangannya oleh pihak eksekutif, dan menunggu alokasi anggaran dari pejabat yang berwenang (KAPD) dan masalah tanggungan atau menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
2. Untuk penguatan Aspek Investigasi atas dugaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, pada Desa Kaping Kecamatan Purworejo Kabupaten Wonorejo TA 2025, pihak yang bertanggungjawab masih mengupayakan mencari dokumen untuk meluruskan tanggungan atau menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
3. Untuk penguatan Revitalisasi Perencanaan Beras dan Jene pada Pemerintah Desa Baci Kecamatan Pongkorono TA. 2025, pihak Desa Baci Kecamatan Pongkorono masih menunggu jadwal perubahan APBDDesa TA. 2025.
4. Untuk penguatan Pemerintahan, Kinerja atas pengelolaan keuangan dan Aset Desa pada Pantiwala Desa Kaping Kecamatan Purworejo TA 2025, pihak Desa Kaping Kecamatan Pongkorono masih mengupayakan untuk mencari dana untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut,

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMPELAN DAN AKSI/STUDI

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II

Pengelolaan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat sehingga realisasinya dapat melebihi rencana kegiatan di Triwulan II Tahun 2025

Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Partisipasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Pengamplan dan Aksi/Studi

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat aktual atau kegiatan yang berjalan di Triwulan II sehingga realisasinya melebihi target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Partisipasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Pengamplan dan Aksi/Studi

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat aktual atau kegiatan yang berjalan di Triwulan II sehingga realisasinya melebihi target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan). Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai yang telah dicantumkan dalam PKPT Tahun 2026. Melaksanakan kegiatan pendampingan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pengawasan tahunan dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern perangkat daerah.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III seperti Pengawasan Desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan masih atas pendampingan dan asistensi untuk aktivitas Pengendalian Gratifikasi, Monev Perlindungan Desa Anti Korupsi dan FCP di Triwulan III dan IV

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan masih atas pendampingan dan asistensi untuk aktivitas Pengendalian Gratifikasi, Monev Perlindungan Desa Anti Korupsi dan FCP di Triwulan III dan IV



Wonogiri, 03 Juli 2026

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.
197006201994012001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
 Jabatan Pelapor
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
 Jabatan Pimpinan Pelapor

: ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
 : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
 : MARDIANTO, SE
 : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	50	75	150.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.686.780	6.225.000	35.20
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	509.830	900.000	176.53
			1.2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	1	1	100.00	Revisi Laporan Kinerja	100.000	0	0
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	3	100.00	Pengawasan Desa	9.065.950	5.325.000	58.74
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	0	3	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7.910.000	0	0
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	64	61	112.96	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	10.595.500	24.08
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	7	8	114.29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	10.595.500	24.08
3	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	3	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.000.170	0	0.00
			3.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.170	0	0

No	Sasaran Program Alasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Baznas Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kepitan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4	Terlaksananya pendampingan dan asistansi umum etnik pengawasan tabung	Persentase kegiatan pendampingan dan asistansi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tabung	%	30	40	200.00	Pendampingan dan Asistansi	18.459.318	5.171.961	28.02
			4.1	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	2	200.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18.459.318	5.171.961	28.02

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Penguasaan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Revisi Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan revisi antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim. Meskipun mendapat tugas mandatori di luar perencanaan yang harus dilaksanakan atas penanganan kasus aduan masyarakat tetap dapat terselesaikan sehingga realisasinya melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capainya melebihi target yang direncanakan karena adanya penambahan tugas mandatori di luar rencana atas audit investigasi

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tabrassa (PKPT) Tahun 2026 serta analisis pemaparan dan indikator Min sehingga dapat terkukunya sesuai dengan rencananya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penguatan Pengawasan sebagai salah satu kegiatan dalam Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi di Tahunan I yang pelaksanaannya saja dari rencananya di Tahunan II dan pelaksanaan atas TL GPT

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial di Triwulan II karena pelaksanaan atas target tahunannya telah terselesaikan dengan lancar di Triwulan I

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan berdasar audit setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Dana

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Dana Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pendatangannya kerjasama pengawasan internal antar tlin dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tidak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyediaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terselesaikan meski mendapat hambatan tugas tambahan di dari pemerintahan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II

Pendayagunaan dan Alokasi

Tidak ada faktor penghambat yang bersifat krusial atas kegiatan yang berjalan di Triwulan II sehingga realisasinya melebihi target rencananya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang dialami sampai dengan Triwulan II

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III seperti Pengawasan Desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan III menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya
Revisi Laporan Kinerja Sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena pelaksanaan evaluasi telah terselesaikan di Triwulan I dan monitoring tindak lanjut juga telah dilaksanakan di Triwulan II dengan status terselesaikan
Pengawasan Desa Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III
Kerjasama Pengawasan Internal Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Output atas pelaksanaan masih di Triwulan III sebagai rekomendasi dalam pertimbangan penyusunan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT-BR) Tahun 2027
Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan masih atas pendampingan dan asistensi untuk aktivitas Pengendalian Gratifikasi, Money Laundering Desa Anti Korupsi dan FCP di Triwulan III dan IV

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persiapan pelaksanaan di Triwulan III atas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seperti pelaksanaan monitoring (Pengendalian Gratifikasi, Pendampingan Desa Anti Korupsi dan FCP)

Wonogiri, 03 Juli 2026

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.
197006201994012001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
 Jabatan Pelapor
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
 Jabatan Pimpinan Pelapor

: SRIYONO, S.Sos, M.M
 : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 : MARDIANTO, S.E
 : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	51.36	59.72	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	34.051.920	13.113.130	38.51
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	40	44	110.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.246.920	4.010.000	24.68
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	50	45	90.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	9.103.130	51.13

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Penerimaan tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaianya sampai dengan Triwulan II adalah 51,36%. Hal ini sebagian disebabkan dengan capaian Triwulan I. Kemudian faktor pendukungnya adalah tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan dukungan dalam monitoring tindak lanjut rekomendasi yang mendukung pemantauan (SIMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pencapaian pelaksanaan pengawasan dari karena ada beberapa aktivitas pengawasan seperti Review HPB yang belum dapat terlaksana karena belum ada surat permohonan review dari perangkat daerah terkait sehingga aktivitas pengawasan yang tertunda tersebut dilakukan dengan pelaksanaan penyusunan dan sehingga realisasi atau kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal melebihi rencana targetnya.

Penyelenggaraan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional belasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan koordinator tim.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Penerimaan tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaianya sampai dengan Triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Triwulan I, dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan II masih terdapat banyak rekomendasi hasil pengawasan yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan beberapa faktor penghambatnya sebagai berikut:

1. Sebagian rekomendasi mengakibatkan terjadinya penundaan dalam menyelesaikan waktu penyelesaian tidak panjang
2. Ketersediaan data yang tidak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan
3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 evaluasi SIMHP harus sudah selesai dilaksanakan dan pemantauan tindak lanjut direncanakan akan dilakukan sejak pada Triwulan III Tahun 2026 sehingga belum bisa menambah pemantauan tindak lanjut di Triwulan II Tahun 2026
4. Kurang responsifnya perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi
5. Sistem otomatisasi pemantauan tidak lanjut atau hasil pengawasan tahun sebelumnya di Triwulan II Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang timbul sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026

Penyelenggaraan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu

Belum dapat tercapai sesuai rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026 karena beberapa aktivitas pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu tidak dapat terlaksana, yaitu Review HPB. Hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Inspekturat karena kewenangan permohonan review dari perangkat daerah terkait dan pengesahan dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa perangkat daerah terkait yang belum menyelesaikan permohonan review HPB.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III dan menyelesaikan target di Triwulan II yang belum terpenuhi karena beberapa aktivitas pengawasan yang belum dapat terlaksana.

Wongiri, 03 Juli 2026

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan



SRUYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

INSPEKTORAT

TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

Jabatan Pelapor

Nama Pimpinan yang Melakukan Monitor

Jabatan Pimpinan Pelapor

: **GRIYONO, S.Sos, M.M**

: **Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

: **MARDIANTO, SE**

: **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Nama Program Akron	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Melaksanakan terjadinya pengelolaan atau pengelolaan, baik yang bersifat anggaran atau non anggaran	Pemertama tindak lanjut pelaksanaan hasil pengurusan,	1	Terdapatnya pengurusan internal sesuai dengan pengurusan tahunan	Pembacaan kegiatan pengurusan internal yang telah dilakukan dan diadanya pengurusan tahunan	%	40	44	110.00	Pengelolaan Pengurusan Internal	16.248.920	4.010.000	24.68
			1.1	Terdapatnya Pengurusan PUPA Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengurusan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	Pengurusan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	0	0
			1.2	Terdapatnya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Revisi Laporan Kinerja	1.100.000	480.000	40.91
			1.3	Terdapatnya Pengurusan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengurusan Desa	Laporan	1	2	200.00	Pengurusan Desa	13.395.920	3.540.000	26.38
			1.4	Terdapatnya Kerja Sama Pengurusan Internal	Jumlah Keaktifan Pengurusan Internal yang Tersebut	Keaktifan	1	1	100.00	Kerja Sama Pengurusan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertamaan BPP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemertamaan APF	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertamaan BPP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemertamaan APF	Dokumen	0	4	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertamaan BPP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemertamaan APF	400.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Page	Realisasi	(%)
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	50	48	90.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	9.103.130	51.13
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	9	90.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	9.103.130	51.13

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan pengawasan desa karena ada beberapa aktivitas pengawasan seperti Reviu HPS yang belum dapat terlaksana karena belum ada surat permohonan reviu dari perangkat daerah terkait sehingga aktivitas pengawasan yang tertunda tersebut dilakikan dengan pelaksanaan pengawasan desa sehingga realisasi atas kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal melebihi rencana tergetnya.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Penambahan pengawasan 1 desa dari target yang telah direncanakan sampai dengan Triwulan II dikarenakan beberapa aktivitas pengawasan dengan tujuan tertentu seperti Reviu HPS, beberapa belum dapat terlaksana sampai dengan Triwulan II karena belum ada surat permohonan dari Perangkat Daerah terkait sehingga berdasarkan hasil rapat rencana operasional bulanan, pelaksanaan atas 1 pengawasan desa di Triwulan III dimajukan ke Triwulan II sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan II melebihi target rencana awalnya.

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan reviu antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APFIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim

G. FAKTOR PENGHAMBAT

Peningkatan Penguasaan Individu

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026

Penguasaan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Penguasaan Talenta (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya sesuai dengan Triwulan II

Rapat Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang muncul karena penguasaan berjalan rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan sesuai AKIP dapat berjalan lancar

Penguasaan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga pelaksanaan Penguasaan Desa Tahun Anggaran 2026 di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Kegiatan Penguasaan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang muncul sehingga penantunannya kegiatan penguasaan internal akan bisa dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Belum semua laporan penguasaan yang untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atau rekomendasi hasil penguasaannya dan tidak semua laporan hasil penguasaan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyusunan Penguasaan dengan Tujuan Tertentu

Belum dapat tercapai sesuai rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026 karena beberapa aktivitas penguasaan dalam kegiatan penyelenggaraan penguasaan dengan tujuan tertentu tidak dapat terlaksana, yaitu Rapat HPS. Hal ini tidak dapat dikendalikan oleh Inspektoran karena kewenangan pemberian surat dari perangkat daerah terkait dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa perangkat daerah terkait yang belum mengirimkan permohonan surat HPS.

Penguasaan dengan Tujuan Tertentu

Belum dapat tercapai sesuai dengan targetnya karena beberapa aktivitas penguasaan dengan tujuan tertentu seperti Rapat HPS masih ada sebagian yang belum mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan revisi sehingga capaiannya belum dapat tercapai sesuai rencana targetnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi ANIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan kerja antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III dan menyelesaikan target di Triwulan II yang belum terpenuhi karena beberapa aktivitas pengawasan yang belum dapat terlaksana.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonorejo, 02 Juli 2026

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SRIYONO, S.Sos, M.M.
: Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
: MARDIANTO, S.E
: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Ketanggunan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	2.2	2.56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	33.412.632	4.680.000	14.01
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	48	55	114.58	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.901.920	900.000	5.32
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	50	50	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	3.780.000	22.89

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya sampai dengan Triwulan II masih 2,2% dengan faktor pendukungnya adalah Adanya komitmen perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, Tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan Dukungan sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi yang memudahkan pemantauan (SEMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiannya sampai dengan Triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Triwulan I, dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan II masih terdapat banyak rekomendasi hasil pengawasan yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan beberapa faktor penghambatnya sebagai berikut :
1. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang 2. Ketersediaan data dukung tindak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan 3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 evaluasi AKIP harus sudah selesai dilaksanakan dan pemantauan tindak lanjut direncanakan akan dilakukan desk pada Triwulan III Tahun 2026 sehingga belum bisa menambah persentase tindak lanjut di Triwulan II Tahun 2026 4. Kurang responsifnya perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi 5. Belum optimalnya pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan tahun sebelumnya di Triwulan II Tahun 2026
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan). Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Wonogiri, 03 Juli 2026

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat



SRIYONO, S.Sos, M.M.
197103271991011003



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2024

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
 Jabatan Pelapor
 Nama Pimpinan yang Melakukan Manev
 Jabatan Pimpinan Pelapor

: SRIYONO, S.Sos, M.M.
 : Ptl. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
 : MARDIANTO, SE
 : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Program Atasnya	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Besaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pago	Realisasi	(%)
1	Memorannya terjadinya penyempurnaan sistem pengelolannya, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kelembagaan	Pemantauan tidak terjadi pelaksanaan hasil pengamatan	1	Terlaksananya pengamatan internal sesuai revisi pengawasan tindakan	Pengamatan kegiatan pengawasan internal yang telah diambil dibandingkan dengan pengawasan tindakan	%	98	85	84.68	Pengembangan Pengawasan Internal	16.901.820	900.000	5.32
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100.00	Pengamatan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	450.000	36.00
			1.2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Revisi Laporan Kinerja	1.200.000	0	0
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	0	0.00	Pengawasan Desa	12.950.900	450.000	3.43
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keanggotaan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Dokumen	0	3	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	400.000	0	0

No	Nama Program /Mekanisme	Indikator	Klasifikasi							Kuantitas			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Metrik	Target Triwulan 2	Kendaraan	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Terlaksananya pengabdian dengan tujuan bertahap sesuai rencana pengabdian tahunan dan semester lainnya	Persentase kegiatan pengabdian dengan tujuan bertahap yang telah selesai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	50	50	100.00	Pengabdian Pengabdian dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	3.750.000	22.69
			2.1	Terlaksananya Pengabdian Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	?	?	100.00	Pengabdian Dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	3.750.000	22.69

B. FAKTOR PENDUKUNG

Peningkatan Pengawasan Internal

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitea tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Penguatan Kinerja Pemadatan Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Penguatan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitea tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Revitalisasi Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Penguatan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitea tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKP 100% di bulan Juni 2026 (Tribulan II Tahun 2026)

Pengawasan Baku

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitea tim

Kerja sama Pengawasan Internal

Komitea semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pemadatan dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan serta antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Selama Komitea dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APSP dan pemangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempengaruhi proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitea tim.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional tahunan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitea tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengembangan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat mencapai rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2020

Pengawasan Kinerja Pemadatan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Kerja Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan berbasis hasil setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi internal di tahun 2020 sehingga pelaksanaan evaluasi AMP dapat berjalan lancar

Pengawasan Dana

Pemantauan penyelesaian pengawasan kinerja atas audit kinerja tidak optimal terkait program breksistem gratis sehingga pelaksanaan atas 1 pengawasan dana yang di rencanakan sampai Triwulan II ditunda dan dilanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Jarak Jauh

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga koordinasi kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AMP

Setelah semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut akan rekomendasi hasil pengawasannya akan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan atau LHP diakhiri

Pengawasan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 03 Juli 2026

Pt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

SRIYONO, S.Sos, M.M.
197103271991011002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :
 Jabatan Pokok :
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monv :
 Jabatan Pimpinan Pokok :

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
 : FR. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
 : MARDIANTO, S.N
 : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Rencana Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran AMP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APF	1	Memonumnya terjadinya penyelenggaraan atau penyelenggaraan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kepemimpinan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	41.61	48.18	PROGRAM FAKSIKELANGGARAN PENGAWASAN	61.631.420	12.379.936	24.79
		Indeks Efektivitas Pengendalian Keuangan (IEPK)	2.1	Terselenggaranya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan pengawasan internal yang telah diselesaikan dibandingkan dengan pengawasan tahunan	%	70	77	110.00	Pengelolaan Pengawasan Internal	17.741.920	4.620.000	28.48
			2.2	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mendukung lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah diselesaikan dibandingkan dengan rencana lainnya	%	24	27	112.50	Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30.880.000	8.259.936	24.38

No	Gagasan Strategis	Indikator	Kinerja							Kemampuan			
			No	Subtipe Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Metrik	TARGET Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Keefektifan kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian akses perangkat daerah dan pengisian integritas	%	100	100	100.00	PROGRAM PERMUTUHAN, KEBERATAN, PEMAMPUAN DAN ASISTENSI	10.910.000	4.793.100	24.28
			2.1	Terwujudnya dokumen perencanaan program berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	10.000.000	2.143.000	21.43
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana program tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengisian tahunan	%	100	100	100.00	Pendampingan dan Asistensi	10.910.000	2.650.100	24.29
			2.1	Terwujudnya dokumen perencanaan program berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	10.000.000	2.143.000	21.43
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana program tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengisian tahunan	%	100	100	100.00	Pendampingan dan Asistensi	10.910.000	2.650.100	24.29

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaianya sampai dengan Triwulan II adalah 41,61%. Hal ini menurun dibandingkan capaian Triwulan I. Kemudian faktor pendukungnya adalah tersedianya regulasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan Dukungan sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi yang memudahkan pemantauan (SIMHP/Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan).

PROGRAM PERUMUSAN KERJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Telah dilakukan pendampingan penilaian mandiri SPIP dan rapat pembangunan Zona Integritas terkait sebagai capaian pada Triwulan II dengan indikatornya adalah Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas dan faktor pendukungnya : Dukungan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah, Tersedianya sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi dalam pengendalian intern dan penguatan integritas dan Adanya kebutuhan perangkat daerah terhadap pendampingan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai yang telah direncanakan dan tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan audit kinerja untuk peningkatan penilaian Kapabilitas APIP sehingga realisasinya melebihi rencana aksi nya di Triwulan II Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dan dukungan pimpinan sehingga kegiatan SPIP dalam pendampingan penilaian mandiri dapat terlaksana dengan lancar dan pembangunan Zona Integritas juga telah terlaksana rapatnya di Triwulan II.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dan dukungan pimpinan sehingga kegiatan SPIP dalam pendampingan penilaian mandiri dapat terlaksana dengan lancar dan pembangunan Zona Integritas juga telah terlaksana rapatnya di Triwulan II.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENTELERONGARAAN PENGAWASAN

Insinyur Perencanaan tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaianya sampai dengan Triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Triwulan I, dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan II masih terdapat banyak rekomendasi hasil pengawasan yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan beberapa faktor penghambatnya sebagai berikut :

1. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang
2. Ketersediaan data dalam tindak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses pengumpulan
3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 evaluasi AKIP belum sudah selesai dilaksanakan dan pemantauan tidak lanjut dilaksanakan atau ditindaklanjuti pada Triwulan III Tahun 2026 sehingga belum bisa menambah persentase tindak lanjut di Triwulan II Tahun 2026
4. Kurang rampungnya perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi
5. Belum optimalnya pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan selama sebelumnya di Triwulan II Tahun 2026

PENDAMPINGAN KEMAJUAN, PEMBANGUNAN DAN AKADEMIK

Beberapa perangkat daerah tidak tepat waktu dalam pengumpulannya sehingga sehingga menghambat pelaporan dari APD

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang kronis sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang kronis sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pemantauan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Pendampingan dan Akademik

Tidak ada faktor penghambat yang kronis sehingga pelaksanaan Pendampingan dan Akademik sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pemantauan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Pendampingan dan Akademik

Tidak ada faktor penghambat yang kronis sehingga pelaksanaan Pendampingan dan Akademik sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan). Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai yang telah dicantumkan dalam PKPT Tahun 2026. Melaksanakan kegiatan pendampingan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pengawasan tahunan dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern perangkat daerah.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III seperti Pengawasan Desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Melanjutkan aktivitas yang telah dimulai sejak Triwulan I atas sosialisasi penilaian mandiri SPIP serta pembangunan XI untuk dilakukan penjaminan kualitas SPIP nya begitu juga pendampingan XI di Triwulan III.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Melanjutkan aktivitas yang telah dimulai sejak Triwulan I atas sosialisasi penilaian mandiri SPIP serta pembangunan XI untuk dilakukan penjaminan kualitas SPIP nya begitu juga pendampingan XI di Triwulan III.



MARDIANTO, S.E.
197101241999031002

Wonogiri, 03 Juli 2026

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

INSPEKTORAT

TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

Jabatan Pelapor

: Pjt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, SE

Jabatan Pimpinan Pelapor

: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	70	77	110.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.741.920	4.520.000	25.48
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	1	0.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	180.000	14.40
			1.2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	22	22	100.00	Revisi Laporan Kinerja	2.440.000	1.330.000	54.51
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	5	2	40.00	Pengawasan Desa	13.550.920	3.010.000	22.21
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dokumen	0	5	0.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	400.000	0	0

No	Sasaran Program Adapun	Indikator	Klasifikasi						Kendaraan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Berikut	Target Tahunan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan apendatur lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	24	27	112.50	Pengawasan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33.860.000	37.539.500	111.38
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	8	9	112.50	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33.860.000	37.539.500	111.38
3	Meningkatnya jumlah pengembangan dan ekspansi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengembangan intern pemerintah daerah dan penguatan integritas	3	Terlaksananya dukungan pemerintah pengembangan kegiatan politik	Jumlah Dokumen Pemerintahan Pengembangan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Pemerintah Kebijakan Teknik di Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pengembangan	10.000.000	2.143.000	21.43
			3.1	Terlaksananya Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitasi Pengembangan yang Disusun	Dokumen	0	0	0.00	Pemerintah Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitasi Pengembangan	10.000.000	2.143.000	21.43
			4	Terlaksananya pengembangan dan ekspansi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengembangan dan ekspansi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengembangan tahunan	%	100	100	100.00	Pengembangan dan Asistensi	10.910.000	2.143.100	24.29
			4.1	Terlaksananya Pengembangan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diperoleh Pengembangan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pengembangan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.525.000	2.200.000	26.39

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	985.000	0	0
			4.3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.400.000	400.100	28.58

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Percepatan pelaksanaan audit kinerja untuk peningkatan penilaian Kapabilitas APF sehingga realisasinya melebihi rencana awal ya di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemeliharaan Daerah

Percepatan penyelesaian pengawasan kinerja atas audit kinerja Nominas sektoral terkait infrastruktur jalan sebagai upaya dalam peningkatan penilaian Kapabilitas APF sehingga capaian kinerja atas sub lengkapat pengawasan kinerja di Triwulan II Tahun 2026 melebihi target rencana awal yang telah disusun

Revitalisasi Program Kinerja

Pelaksanaan rapat koordinasi operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan Komitmen Tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian masalah APF 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Kerjasama Pengawasan Internal

Memotivasi seluruh tim dalam penandatangan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan kerja sama tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam mendokumentasi dan mencatat hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APF dan pengingat daerah. Selain itu, ketersediaan data, formatap pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai untuk mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat koordinasi operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Capaiannya melebihi target yang direncanakan karena adanya penunjang tugas mandiri di luar rencana

Pemenuhan Kebutuhan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Selain ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Pemenuhan Kebutuhan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Selain ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dan dukungan pimpinan sehingga kegiatan SPF dalam pendampingan pelatihan mandiri dapat terlaksana dengan lancar dan pembangunan Zona Integritas juga telah terlaksana sepenuhnya di Triwulan II.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Telah dilaksanakan :

1. monitoring implementasi RTP Semanggi II Tahun 2024 serta pendampingan dan evaluasi penyusunan dokumen pertanggung RTP Tahun 2026 pada semua perangkat daerah dengan fokus pendampingan adalah aspek aktif dari perangkat daerah atas hasil monitoring, pendampingan dan evaluasi yang dilakukan oleh AMP (Tahapan I)

2. Sosialisasi dalam pelaksanaannya melalui AMP pada semua perangkat daerah (Tahapan II)

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemilahan Reformasi Birokrasi

Kepuasan semua tim dalam pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi tahap pemilahan pada perangkat daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas

Kepuasan semua tim dan satuan dari pimpinan dalam pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada perangkat daerah sesuai yang telah diumumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan audit kinerja di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Belum tercapai sesuai rencana targetnya karena penundaan 1 pengawasan desa di Triwulan I untuk melakukan percepatan evaluasi AKIP dan terjadi penundaan kembali atas 2 pengawasan desa di Triwulan II untuk melakukan percepatan pelaksanaan audit kinerja untuk peningkatan penilaian kapabilitas APIP sehingga realisasinya masih kurang atas 3 pengawasan desa jika dibandingkan dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga penandatanganan kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

1. Belum semua perangkat daerah menyelesaikan penyusunan laporan RTP Semester II tahun 2025 dan perubahan RTP Tahun 2026 secara tepat waktu sehingga harus dibuatkan surat *feedback* hingga tiga kali dan menghambat pelaporannya oleh APIP (Triwulan II)

2. Perubahan kebijakan pengisian position mandiri BPPT dan yang telah dilaksanakan sehingga harus dilakukan konsultasi ke BPPT serta menyusun kembali surat perjanjian untuk pelaksanaan position mandiri BPPT (Tahap 1)

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemastian Reformasi Birokrasi

Tidak ada faktor penghambat yang berarti sehingga pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi tahap perencanaan di Tahap 1 dapat berjalan dengan lancar sesuai untuk pelaksanaan evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan baru akan dilaksanakan di Tahap 2

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengisian Integritas

Tidak ada faktor penghambat yang berarti sehingga pelaksanaan monitoring laporan Kerja Kelayakan Aparatur Negara (LKLAN) di Tahap 1 dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengembangan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang sesuai dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan II seperti Pengawasan Desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan kinerja yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Mutu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi APJF di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tertantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Kegiatan Pengawasan Internal

Melaksanakan mutu aktivitas internal yang telah tertantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJF

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengembangan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV sebagai rekomendasi dalam partisipasi penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), uraian aktivitas pendukungnya dalam pelaksanaan rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun luar daerah dalam fasilitasi kebijakan pengawasan telah berjalan dan terjadi pempertanian anggarannya

Pendampingan dan Asistensi

Melanjutkan aktivitas yang telah dimulai sejak Triwulan I atas sosialisasi pelatihan mandiri SPMP serta pendampingan II untuk dilakukan pendampingan kualitas SPMP nya juga pendampingan II di Triwulan III

Pendampingan dan Asistensi Timor Pemerintahan Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi dengan HPKP secara berkala terkait QA penilaian SPIP yang dilakukan oleh EPRP di Triwulan III sampai dengan IV dengan hasilnya di akhir tahun 2026

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Melanjutkan pelaksanaan evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan atas rencana Triwulan I dan II, di Triwulan III

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Meskipun capaiannya telah 100% karena pengukuran indikator capaiannya adalah jumlah perangkat daerah tapi secara aktivitas pelaksanaannya masih berlanjut. Hal ini dikarenakan dalam sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas tidak hanya memuat monitoring LHKM saja tapi juga terkait Pembangunan Zona Integritas yang pelaksanaannya masih berjalan di Triwulan III



Wonogiri, 03 Juli 2026

Pt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dewi Attutlaningrum".

DEWI ATTUTLANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
: Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
: MARDIANTO, S.E
: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Memurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	5.2	6.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	38.119.750	12.918.040	33.89
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	62	71	114.52	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	23.614.750	8.768.040	37.13
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	50	50	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14.505.000	4.150.000	28.61

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELINGKURAHAN PENGAWASAN

Indikator Personalia tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiananya sampai dengan Triwulan II adalah 8,2%. Hal ini menurut dibandingkan capaian Triwulan I. Menurut faktor pendukungnya adalah tersedianya regulasi dan penerapannya penerapannya tidak lanjut hasil penguraian dan Dukungan sistem monitoring tidak lanjut rekomendasi yang memudahkan penerapannya (SOP/Prosedur Informal Monitoring Hasil Pengawasan).

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitees tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan dapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitees tim.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELINGKURAHAN PENGAWASAN

Indikator Personalia tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan Capaiananya sampai dengan Triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Triwulan I, dengan faktor penghambatnya adalah Pada Triwulan II masih terdapat banyak rekomendasi hasil pengawasan yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan beberapa faktor penghambatnya sebagai berikut :

1. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang
2. Ketersediaan data pendukung tidak lanjut dari perangkat daerah masih dalam proses penyempurnaan
3. Rekomendasi tidak lanjut yang paling banyak belum ditindaklanjuti adalah terkait tidak lanjut atau pelaksanaan rencana AKIP yang rencana pelaksanaan penerapannya masih di Triwulan IV sehingga hal tersebut menjadikan penyelesaian tidak lanjutnya masih kecil

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (telah dilaksanakan rapat koordinasi internal terkait monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan), Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut dan Melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan tepat waktu.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III seperti Audit Kinerja, Revisi Rancangan APBD dan aktivitas pengawasan lainnya sesuai PKPT Tahun 2026

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 03 Juli 2026

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI AYTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEJABAT
INSPEKTORAT
TAHUN 2023

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :
 Jabatan Pelapor :
 Nama Pimpinan yang Melakukan Moner :
 Jabatan Pimpinan Pelapor :

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
 : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
 : MARDIANTO, SE
 : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE-2

No	Rencana Program Kinerja	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Berapa kali Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Tercapaian (%)	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Page	Realisasi	(%)
1	Menumbuhkembangkan penyelenggaraan atau penyelenggaraan baik yang bersifat program maupun proses dan berkelanjutan	Persentase tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Tertindakannya pengurusan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengurusan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengurusan tahunan	%	63	71	114,62	Pengurusan Pengawasan Internal	33.814.750	6.768.000	37,13
			1.1	Tertindakannya Pengurusan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0,00	Pengurusan Kinerja Pemerintah Daerah	1.280.000	0	0
			1.2	Tertindakannya Pengurusan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100,00	Pengurusan Kegiatan Pemerintah Daerah	6.400.000	4.030.000	62,81
			1.3	Tertindakannya Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	Laporan	3	3	100,00	Review Laporan Kinerja	1.060.000	109.000	9,52
			1.4	Tertindakannya Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100,00	Review Laporan Keuangan	2.900.000	4.448.000	78,39
			1.5	Tertindakannya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terkoreksi	Kesepakatan	1	1	100,00	Kesepakatan Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.6	Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Dokumen	0	1	0,00	Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	8.913.750	100.000	1,24

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			3	Tertanggungjawabnya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	80	80	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14.505.000	4.150.000	28.61
			2.1	Tertanggungjawabnya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	100.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	900.000	600.000	66.67
			2.2	Tertanggungjawabnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	10	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13.605.000	3.550.000	26.09

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Revisi Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Revisi Laporan Keuangan

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan revisi antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APF dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim.

Pemanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Telah terlaksana Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Daerah Semester 1 Tahun 2026 di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKOP dapat berjalan lancar

Revisi Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Revisi atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga penandatangan kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan tugas atas penyelesaian kerugian daerah sampai dengan Triwulan II dapat berjalan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Melanjutkan pelaksanaan aktivitas pengawasan yang masuk dalam kegiatan pengawasan internal di Triwulan III seperti Audit Kinerja, Revisi Rancangan APBD dan aktivitas pengawasan lainnya sesuai PKPT Tahun 2026

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena pelaksanaan Asistensi penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 masih di Triwulan IV sehingga target setahun atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dapat terpenuhi

Revisi Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Revisi Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tindak lanjutnya di Triwulan III adalah melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil atas hasil pembahasan penanganan kerugian daerah Semester I dengan BPK untuk kemudian dilakukan kembali pembahasannya atas Semester II di akhir tahun (Triwulan IV Tahun 2026).

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 03 Juli 2026

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANDIGRUM, S.Es., M.M
197402061999032008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pejabat
Nama Pimpinan yang Melakukan Honor
Jabatan Pimpinan Pejabat

: NURMI HASTUTI, S.E., M.M.
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIMULAN KE -2

No	Rencana Kegiatan Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sumbu Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatkan layanan administrasi bidang umum dan umum pada perangkat daerah	Persentase layanan administrasi BMD	1	Terlaksananya Pengamanan Ruang Milik Daerah BKPD	Jumlah Pelayanan Pengamanan Ruang Milik Daerah BKPD	Dokumen	3	3	100.00	Pengamanan Ruang Milik Daerah BKPD	482.500	0	0
2	Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar jabatan	2	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100.00	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.848.000	0	0
			3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	100.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.048.000	296.000	28.48
			4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/tahun	18	18	100.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	81.319.335	67.77
5	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	5	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.847.200	287.000	10.08
			6	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Kantor	50.000.000	21.152.380	42.31
			7	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Kantor	1.975.200	450.000	22.78

No	Sasaran Kegiatan Utama	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Paga	Realisasi	(%)
			8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.900	1.039.000	5.20
			9	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Periodik Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.176.000	2.147.500	35.07
			10	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKP	Laporan	1	1	100.00	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKP	40.032.450	1.925.000	4.81
			11	Terselenggaranya Pemeliharaan Arip Damsa pada RKP	Jumlah Dokumen Pengawasan Arip Damsa pada RKP	Dokumen	1	1	100.00	Pengelolaan Arip Damsa pada RKP	288.000	0	0
			12	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada RKP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada RKP	Dokumen	0	0	0.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada RKP	848.000	0	0
13	Tersedianya jasa penjangkauan informasi pemerintahan daerah melalui dengan kebutuhan penjangkauan daerah	Pembinaan penyediaan jasa penjangkauan informasi pemerintahan daerah melalui dengan kebutuhan penjangkauan daerah	13	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100.00
			14	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.360.000	17.630.321	37.04
			15	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.372.000	58.561.948	48.68
16	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penjangkauan urusan pemerintahan daerah	Pembinaan pemeliharaan barang milik daerah penjangkauan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dikelola	Unit	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.680.350	8.704.000	42.09
			17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Dikelola	Unit	2	2	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.180.000	17.324.339	53.86
			18	Terselenggaranya Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Disediakan	Unit	3	1	33.33	Pemeliharaan Mobil	990.000	423.000	42.73

No	Kategori Kegiatan Aksean	TerdMinat	Klasifikasi						Kegiatan				
			No	Kategori Sub Kegiatan	Definisi Kegiatan	Estimasi	Tingkat Fasilitas 2	Kualitas	(%)	Sub Kegiatan	Fase	Keluaran	(%)
			19	Perencanaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	Unit	4	+	100.00	Perencanaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	7.600.000	3.300.000	44.00
			20	Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Rehabilitasi	Unit	0	0	0.00	Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.832.000	487.100	6.91

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengamanan RASANG NINJA DARI RUPD
Ketersediaan data dalam pelaksanaan rencana RUPD Triwulan I Tahun 2024 yang dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2024
Pondokan dan Pengalihan Administrasi Korporeitas
Ketersediaan data dan informasi dengan wawasan terkait Pengalihan dan Pengalihan Administrasi Korporeitas atau tidak terdapat rencana pengalihan kebetulan dan upaya untuk melakukan korporeitas kebetulan ke RUPD M
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Ketersediaan data dan informasi terkait Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai oleh RUPD Triwulan IV Tahun 2024 (di Triwulan II dan RUPD Triwulan I Tahun 2025 (di Triwulan III)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Ketersediaan data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai dengan Triwulan II dapat berjalan lancar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Penggunaan Listrik
Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan akan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Penggunaan Listrik
Penyediaan Instalasi dan Peralengkapan Kantor
Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan akan Peralatan dan Peralengkapan Kantor di tahun 2024
Penyediaan Instalasi Rumah Tangga
Ketersediaan anggaran dan data pemenuhan Penyediaan Instalasi Rumah Tangga di Tahun 2024
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Tashtat Korporeitas Tami
Ketersediaan anggaran dalam Fasilitas Korporeitas Tami
Pengelolaan Rujukan Rujukan Koordinasi dan Koordinasi RUPD
Ketersediaan anggaran dalam Pengelolaan Rujukan Koordinasi dan Koordinasi RUPD
Pemenuhan Aspek Himpun pada RUPD
Ketersediaan data untuk aktif dan aktif
Dukung Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Sistem Elektronik pada RUPD
Pembentukan dan pelaksanaan RUPD dan sistem pengalihan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Fasilitas Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Fasilitas Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Instalasi

1	Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Mebel	
2	Pemeliharaan Fasilitas dan Media Lainnya	
3	Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Fasilitas dan Media Lainnya seperti biaya listrik dan gas	
4	Pemeliharaan/Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
5	Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan/Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

6		
7		
8		

9		
10		
11		
12		

13		
14		
15		
16		

17		
18		
19		
20		

21		
22		
23		
24		

25		
26		
27		
28		

29		
----	--	--

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengamanan Ruang Milik Rumah BKPD

Belum dapat tercapai sampai target rencananya karena pelaksanaan rehabilitasi area terdampas I di Terusan II dan sekitarnya sebagian besar yang khusus, pelaksanaan rehabilitasi di bagian di bagian di bagian

Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan yang rutin sehingga belum ada faktor penghambat yang khusus yang dapat menghambat Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan selama ini

Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitas Kinerja Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang khusus dalam proses Monitoring, Evaluasi dan Fasilitas Kinerja Pegawai sampai dengan Terusan II Tahun 2020 akan kinerja pegawai di Terusan IV Tahun 2021 dan Terusan I Tahun 2020

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan mandatori di saat perencanaan sehingga terdapat pelaksanaan pegawai terkait yang telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang menjadi di bagian

Penyediaan Komposisi Struktur Organisasi, Anggaran Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang khusus karena pelaksanaan sudah rutin

Penyediaan Peralatan dan Penguasaan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang khusus sehingga pelaksanaan Peralatan dan Penguasaan Kantor dapat berjalan dengan lancar

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tidak ada faktor penghambat yang khusus dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Ruang Cetak dan Pengadaan

Tidak ada faktor penghambat yang khusus sehingga pelaksanaan Penyediaan Ruang Cetak dan Pengadaan dapat berjalan lancar

Penyediaan Ruang Tamu

Tidak ada faktor penghambat yang khusus dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Tamu

Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komunikasi BKPD

Tidak ada faktor penghambat yang khusus dalam Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komunikasi BKPD

Pemertahanan Arsip Dokumen pada BKPD

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada pelaksanaan atau Pemertahanan Arsip Dokumen pada BKPD sampai dengan Terusan II Tahun 2021

Bantuan Pelaksanaan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik pada BKPD

Terjadi perubahan regulasi dan BKPD menjadi Pematikan sehingga penghambat untuk kegiatan untuk saat ini dengan konsep yang baru dalam pelaksanaan administrasi BKPD sebagai arsitektur Pematikan

Penyediaan Jasa Surat Elektronik

Tidak ada faktor penghambat yang khusus

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Garam, Daya Air dan Listrik

Tidak ada faktor penghambat yang khusus

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang khusus dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan dan Kebutuhan dan Kebutuhan

Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan dan Kebutuhan dan Kebutuhan di Terusan I Tahun 2021

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kebutuhan dan Operasional dan Lapangan

Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kebutuhan dan Operasional dan Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Tidak ada keter pengharapan dalam Pemeliharaan Mebel sampai dengan Triwulan II

Pemeliharaan Perawatan dan Meubel Lainnya

Tidak ada keter pengharapan dalam Pemeliharaan Perawatan dan Meubel Lainnya sampai dengan triwulan II Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tidak keter pengharapan dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 karena belum ada realisasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Melanjutkan pelaksanaan rekonsiliasi atas Triwulan II di Triwulan III
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Melanjutkan pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM di Triwulan III Tahun 2026
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Melanjutkan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan III atas kinerja pegawai Triwulan II Tahun 2026
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai rencana dalam data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 untuk Triwulan III Tahun 2026
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Triwulan III
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Triwulan III Tahun 2026
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Triwulan III Tahun 2026
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Triwulan III Tahun 2026
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Melanjutkan pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu di Triwulan III Tahun 2026
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Melanjutkan pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Triwulan III Tahun 2026
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Triwulan IV Tahun 2026 sesuai yang direncanakan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Melanjutkan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi kinerja Pemdi di Triwulan III Tahun 2026
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Triwulan III

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Mebel di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan III Tahun 2026

Sekretaris



MULVANTO, S.E.
196806181993031010

Wonorejo, 30 Juni 2026

Kepala Sub Region Umum dan Kepegawaian



MURNI HASTUTI, S.E., M.M.
197501102009032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
 Jabatan Pelapor
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
 Jabatan Pimpinan Pelapor

: PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
 : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 : MULYANTO, S.E.
 : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atekan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang diselesaikan	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	0.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	987.000	980.000	99.29
			2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	940.000	490.000	52.13
3	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	44	100.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.677.241.956	3.297.263.854	49.38
			4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.194.000	3.880.000	21.34
			5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	7	7	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	494.000	228.000	46.15

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Ketersediaan data dan arahan pimpinan untuk melakukan perubahan atas dokumen perencanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Tahun 2026 sebagai penyesuaian atas perubahan SOTE di Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di Triwulan I
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pembentukan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), pelaksanaan rapat, ketersediaan data, koordinasi yang baik dan arahan dari pimpinan sehingga capainya 100% di Triwulan I atas penyusunan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah (LKJIP Tahun Anggaran 2025)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Ketersediaan data dan arahan pimpinan sehingga proses penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama Triwulan I Tahun 2026 dapat terlaksana dan berjalan lancar sesuai tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Ketersediaan data, dokumen, koordinasi dengan hewahan dan arahan dari pimpinan sehingga penyusunan laporan keuangan akhir tahun dapat terselesaikan di Triwulan I Tahun 2026
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Ketersediaan data, dokumen, koordinasi dengan hewahan dan arahan dari pimpinan sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dapat berjalan lancar

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tidak ada faktor penghambat krusial sehingga proses penyusunan dokumen perencanaan (Dokumen Perubahan RTP Tahun 2026) dapat berjalan lancar
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja/LKJIP Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tidak ada faktor penghambat krusial selama penyediaan Gaji
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun sehingga dapat berjalan dengan lancar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulanan sehingga dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2027 di Triwulan III

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena pelaksanaan evaluasi telah terselesaikan di Triwulan I dan penyelesaian tindak lanjut juga telah dilaksanakan di Triwulan II dengan status terselesaikan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di Triwulan III

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SRPD

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena penyusunan laporan keuangan akhir tahun telah terselesaikan di Triwulan I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SRPD

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan di Triwulan III

Wosogiri, 30 Juni 2026

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010



PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M.
197312271992032002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: WIYADI, S.E
: Pengelola Layanan Operasional
: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	2	100.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	1	33.33	
4	IKM Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100.00	
5	IKM Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya seperti laptop dan printer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan II Tahun 2026
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Mebel sampai dengan Triwulan II
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan II Tahun 2026
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tidak faktor penghambat dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 karena belum ada realisasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Mebel di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan III Tahun 2026

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

Wonogiri, 02 Juli 2026

Pengelola Layanan Operasional

WITYADI, S.E
197010132008011004

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja	: SARWANTO
Jabatan Pelapor	: Pengelola Umum Operasional
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev	: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
Jabatan Pimpinan Pelapor	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	1	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pemeliharaan Mebel
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pemeliharaan Mebel
Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Mebel sampai dengan Triwulan II

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tidak faktor penghambat dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 karena belum ada realisasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Mebel di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan III Tahun 2026

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

Wonogiri, 02 Juli 2026

Pengelola Umum Operasional

SARWANTO
19720817202521025

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Movev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: BAYU SIDIK PURNOMO, S.E
: Penelaah Teknis Kebijakan
: PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)	Dokumen	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan	Laporan	4	4	100.00	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100.00	
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	4	4	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (RAB, RKA dan DPA)

- Pemecanaan jadwal kegiatan telah disusun sesuai tahapan siklus penganggaran.
- Ketersediaan pedoman penyusunan dokumen penganggaran.

Namun belum terlampaui targetnya sampai dengan Triwulan II karena penyusunan RKA/DPA Pembelian 2025 dan RAB, RKA Tahun Anggaran 2027 masih di Triwulan III-IV

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Target sampai dengan Triwulan II telah terpenuhi atas pengumpulan laporan realisasi keuangan di bulan Maret s.d Juni dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Sistem pelaporan rutin telah berjalan.
- Ketersediaan data keuangan.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Telah terlampaikan di Triwulan I atas penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 karena Data keuangan telah tersedia.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Pengalokasi Keuangan Bulanan)

Telah tercapai sesuai dengan targetnya sampai dengan Triwulan II atas laporan pengalokasi keuangan bulan Maret s.d Juni karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Diserahkan (MAK, RKA dan DPA)

Belum sepenuhnya tahapan penyusunan dokumen sehingga belum ada faktor penghambatnya.

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Keterlambatan input data oleh unit kerja. Namun sesuai dengan Triwulan II ini, hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporannya.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Proses koordinasi lintas bidang yang membutuhkan koordinasi tinggi sehingga mengakibatkan waktu yang lama dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Namun hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan akhir tahun ke BPKAD di Triwulan I.

Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan (Laporan Fungsional Kegiatan Bulanan)

Keterlambatan input informasi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporan fungsional kegiatan sampai dengan Triwulan II.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- Mempersiapkan data dukung dan bahan awal penyusunan.
- Koordinasi awal dengan BPKAD/Rappeda terkait jadwal dan kebijakan penganggaran.

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah :

- Penegasan batas waktu pelaporan ke semua sub bagian dan bidang.
- Monitoring berkala atas kepatuhan pelaporan.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena proses penyusunan telah terselesaikan di Triwulan I

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan III untuk laporan fungsional keuangan bulan Juli, Agustus dan September.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonorejo, 06 Juli 2026

Penelaah Teknis Kebijakan


BAYU SIDIK PURNOMO, S.E
199403272020121003

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SITI DARYANTININGSIH, S.E
: Penelaah Teknis Kebijakan
: PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	6	6	100.00	
					Jumlah Laporan Pembayaran TPP	Laporan	6	6	100.00	
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100.00	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Telah terealisasi sesuai targetnya sampai dengan Triwulan II atas penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Bulan Januari s.d Juni karena tersedianya sistem pembayaran gaji terintegrasi. Jumlah Laporan Pembayaran TPP Telah terealisasi sesuai dengan targetnya sampai dengan Triwulan II atas laporan pembayaran TPP bulan Januari, Februari dan Maret karena Mekanisme pembayaran TPP yang telah baku. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Telah terselesaikan di Triwulan I atas penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 karena Data keuangan telah tersedia. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan) Telah tercapai sesuai dengan targetnya sampai dengan Triwulan II atas laporan fungsional keuangan bulan Maret s.d Juni karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Potensi keterlambatan administrasi karena adanya perubahan data pegawai sehingga perlu dilakukan penyesuaian di penyediaan gaji dan tunjangan ASN bulan berikutnya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Belum ditemukan faktor penghambatnya karena sistem pencatatan kinerja telah tersedia untuk dasar pemberian TPP.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Proses koordinasi lintas bidang yang membutuhkan ketelitian tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Namun hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan akhir tahun ke BPKAD di Triwulan I.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Keterlambatan input transaksi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menjadikan keterlambatan penyusunan laporan fungsional keuangan sampai dengan Triwulan II.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pembaruan data ASN secara berkala dengan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Koordinasi dengan BPKAD dalam hal kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulannya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Melanjutkan pelaksanaan pembayaran TPP di Triwulan III

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena proses penyusunan telah terselesaikan di Triwulan I

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan III untuk laporan fungsional keuangan bulan Juli, Agustus dan September.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


PADMI FURI HASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 06 Juli 2026

Pencatat Teknik Kebijakan


SITI DARYANTININGSIH, S.E
196912272007012016

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: BAMBANG MAHESTHI WIBOWO, S.Kom
: Pranata Komputer Ahli Muda
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	6	6	100.00	
					Jumlah Laporan Pembayaran TPP	Laporan	6	6	100.00	
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	6	6	100.00	
3	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Terlaksananya Pemeliharaan Website	Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Aplikasi	1	1	100.00	
			4	Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut SIMHP	Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Aplikasi	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Telah terrealisasi sesuai targetnya di Triwulan II atas penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni karena tersedianya sistem pembayaran gaji terintegrasi.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Telah terrealisasi sesuai dengan targetnya di Triwulan II atas laporan pembayaran TPP bulan Januari sampai dengan Juni karena Mekanisme pembayaran TPP yang telah baku.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Telah tercapai sesuai Dengan targetnya di Triwulan II atas laporan fungsional keuangan bulan Januari sampai dengan karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala

Meskipun belum ada targetnya di Triwulan I namun secara realisasi sudah dilakukan pemeliharaan secara rutin dengan beberapa faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Website/aplikasi telah tersedia dan dapat digunakan sebagai media informasi.
- Tersedianya sarana prasarana pendukung (server, jaringan internet).
- Adanya admin/pengelola website.
- Dukungan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala

- Telah tersedianya aplikasi monitoring tindak lanjut yang digunakan dalam mendukung kegiatan pengawasan.
- Adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi (server, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya).
- Tersedianya admin atau pengelola aplikasi yang memahami alur kerja sistem.
- Adanya kebutuhan organisasi terhadap data tindak lanjut yang akurat dan ter-update sehingga mendorong pemeliharaan aplikasi.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Pengumpulan Gaji dan Tunjangan ASN

Potensi keterlambatan administrasi karena adanya perubahan data pegawai sehingga perlu dilakukan penyusunan di pengeditan gaji dan tunjangan ASN belum terdistribusi.

Jumlah Laporan Pembayaran TPF

Selain ditinjau faktor penghambatnya karena adanya penundaan kinerja telah tersedia untuk dasar pemberian TPF

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Pengalokasi Keuangan Bulanan)

Keterlambatan input transmisi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan fungsional keuangan di Tahunan II.

Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi sebagai berikut :

- Update konten belum dilakukan secara rutin.
- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolahan website.
- Belum adanya jadwal pemeliharaan yang terstruktur.
- Keterbatasan pada pihak terkait dalam pengelolaan teknis.

Jumlah Aplikasi Monitoring Tidak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Rutin

- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pemeliharaan aplikasi sehingga keberlanjutan hanya pada GUK terentu.
- Belum adanya jadwal pemeliharaan berkala yang terstruktur dan terdokumentasi.
- Potensi gangguan teknis seperti error sistem, downtime server, atau masalah jaringan.
- Update atau perubahan kebutuhan program yang belum langsung diimplementasi dalam aplikasi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pembaruan data ASN secara berkala dengan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Koordinasi dengan BPKAD dalam hal keabsahan dan ketepatan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulannya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Melanjutkan pelaksanaan pembayaran TPP di Triwulan III

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan III untuk laporan fungsional keuangan bulan Juli, Agustus dan September.

Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala

- Menyusun jadwal pemeliharaan dan update konten secara berkala.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan keamanan website.

Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala

- Menyusun dan menetapkan jadwal pemeliharaan aplikasi secara berkala.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengelolaan aplikasi.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja aplikasi, termasuk keamanan dan keandalan sistem.
- Mendokumentasikan setiap kegiatan pemeliharaan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.



Wonorejo, 02 Juli 2026

Pranata Komputer Ahli Muda

BAMBANG MAHESHA WIBOWO, S.Kom
198412092009031003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja	: WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.
Jabatan Pelapor	: Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev	: MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor	: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	0	0.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	3	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	7	7	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% dibulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026).

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan II sehingga dapat tercapai sesuai dengan target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian pengawasan kinerja atas audit kinerja lintas sektorat terkait program kesehatan gratis sehingga pelaksanaan atas 1 pengawasan desa yang direncanakan masuk Triwulan II ditunda dan dilanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya, menyesuaikan kondisi *real* jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.
198301242006042011

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monitoring
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MARDIONO, S.P
: Pengolah Data dan Informasi
: PADMI PUJUHASTUTI,SJF., M.M
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIMULAN KE -2

No	Batasan Kegiatan Utama	Indikator	Kinerja							
			No	Batasan Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)	Laporan	17	17	100.00	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Review)	Laporan	23	23	100.00	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pegawainya lainnya)	Laporan	73	73	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan II dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :

- Telah tersusunanya LHP Audit dan Pemeriksaan oleh Bidang sebagai basis utama untuk didokumentasikan.
- Tersedianya sistem atau mekanisme administrasi penastatan dan penyimpanan dokumen (baik manual maupun digital).
- Adanya petugas/pegawai yang menangani fungsi administrasi dan kearsipan.
- Format dan tata naskah dinas yang telah baku sehingga memudahkan proses penastatan dan pengarsipan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Revisi)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan II dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- LHP Revisi telah disusun oleh Bidang sebagai dasar kegiatan dokumentasi.
- Adanya alur administrasi yang mengatur penyusunan dokumen dari Bidang ke bagian pengarsip.
- Tersedianya sarana penyimpanan dokumen (dalam arsip maupun media digital).
- Adanya kelengkapan penastatan dokumen masuk/keluar dalam register atau aplikasi.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lanjutan)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan II dengan beberapa faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Tersedianya berbagai jenis LHP pengawasan lainnya (monitoring, evaluasi, dll) dari Bidang.
- Fleksibilitas dalam bentuk dan jenis dokumen sehingga memudahkan pengumpulan.
- Adanya dukungan administrasi umum dalam pengelolaan dokumen.
- Ketersediaan tempat dan media penyimpanan arsip.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terealisasi (Audit/Pemeriksaan)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat kendala/hambatan seperti :

- Keterbatasan penyediaan LHP dari Bidang kepada pengolah administratif.
- Ketidaksiapan dokumen pada waktu tertentu sehingga proses pencatatan dan penginputan tidak lancar.
- Belum optimalnya sistem pengarsipan digital (misalnya penataan file, folder, atau indexing belum sempurna)

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terealisasi (Revisi)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi seperti :

- Dokumen hasil revisi sering mengalami pembatalan sehingga mengakibatkan proses dokumentasi gagal.
- Kurangnya kapasitas waktu dalam penyampaian dokumen dari Bidang.
- Belum terlaksananya pencatatan dalam register atau sistem administratif.
- Risiko duplikasi atau kehilangan dokumen apabila tidak segera didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terealisasi (Pengawasan Lainnya)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi sebagai berikut :

- Variasi bentuk dokumen menyebabkan belum seagamanya pola pencatatan dan penginputan.
- Tidak semua hasil pengawasan lainnya langsung diserahkan untuk didokumentasikan.
- Potensi keterbatasan dokumentasi karena volume dokumen yang cukup banyak.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang agar LHP yang telah selesai segera diserahkan untuk didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

- Menegaskan mekanisme bahwa hanya dokumen final yang didokumentasikan.
- Meningkatkan kedisiplinan pencatatan dalam buku register atau aplikasi.
- Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum disimpan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

- Mendorong ketepatan waktu penyampaian dokumen dari Bidang.
- Melakukan monitoring rutin terhadap kelengkapan dokumentasi.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



PADMI PUJIHASTUTI, S.IP., M.M
197212271992032002

Wonogiri, 06 Juli 2026

Pengolah Data dan Informasi



MARDIONO, S.E
197012152014061002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	0	0.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	3	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	7	7	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan II sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian pengawasan kinerja atas audit kinerja lintas sektoral terkait program kesehatan gratis sehingga pelaksanaannya atas 1 pengawasan desa yang direncanakan untuk masuk Triwulan II ditunda dan dilanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi *real* jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi *real* jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak
199810142022032007

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt**

Jabatan Pelapor

: **PPUPD Ahli Pertama**

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: **MARDIANTO, SE**

Jabatan Pimpinan Pelapor

: **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	Selesai di TW I dan II
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	Selesai di TW I
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0		0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0		0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti perugasan lainnya
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0		0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	1 Laporan di TW 1 dan nanti 1 Laporan di TW 3
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0		0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan II
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan I Untuk TW I dan II dilaksanakan di TW III (digabung)
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Mandiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Mandiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	TW I dan TW II

B. FAKTOR PENDUKUNG

a. Evaluasi AKIP

- 1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai
- 2) Pra Evaluasi dilakukan revidi atas Dokumen LkJP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
- 3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

b. Revidi LPPD

- 1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan revidi dengan agenda kerja revidi LPPD
- 2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Tata cara pemeriksaan telah dilengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
- 2) Objek Pemeriksaan memberikan respon yang baik atas kegiatan pengawasan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
- 2) Komitmen pemilik Risiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Komitmen Pimpinan
- 2) Suport dari pemilik risiko level Perangkat Daerah
- 3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- 2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- 3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
- 2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

i. Monitoring Laporan LHKAN

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

j. Monitoring Zona Integritas

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

a. Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

b. Reviu LPPD

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya mepet dan/atau telat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

1) Kompetensi belum sesuai standar

2) Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1) kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel

2) Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli

3) Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
- 2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

i. Monitoring Laporan LHKAN

- 1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

j. Monitoring Zona Integritas

- 1) Obrik telah merasa jenuh

D. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Evaluasi AKIP

- 1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
- 2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi Ketika pelaksanaan evaluasi

b. Reviu LPPD

- 1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri
- 2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun kemendagri
- 3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala2 untuk menghasilkan Solusi terbaik

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Peningkatan Kompetensi

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) Dilakukan sosialisasi secara berkala
- 2) Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

e. Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD... (hehehe biar bs nginep di hotel)
- 2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

f. Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.
- 2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

g. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

h. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

i. Monitoring Laporan LHEAN

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

j. Monitoring Zona Integritas

1) Secara berkala melakukan sosialisasi



INSPEKTUR

MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonogiri, 02 Juli 2026

PFUPD Ahli Pertama

ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt
198101262010041001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FARHAN ADNAN IHFANDI, S.Tr.I.P

Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Pertama

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE

Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	Selesai di TW I dan II
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	Selesai di TW I
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	Selesai di TW I (DISARSIPUS)
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0		0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0		0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0		0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	1 Laporan di TW I dan nanti 1 Laporan di TW III
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0		0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan II
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan I Untuk TW I dan II dilaksanakan di TW III (digabung)
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	TW I dan TW II

B. FAKTOR PENDUKUNG**a. Evaluasi AKIP**

- 1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai
- 2) Pra Evaluasi dilakukan revidi atas Dokumen LkJP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
- 3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

b. Revidi LPPD

- 1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan revidi dengan agenda kerja revidi LPPD
- 2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Tata cara pemeriksaan telah dilengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
- 2) Objek Pemeriksaan memberikan respon yang baik atas kegiatan pengawasan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
- 2) Komitmen pemilik Risiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Komitmen Pimpinan
- 2) Suport dari pemilik risiko level Perangkat Daerah
- 3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- 2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- 3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
- 2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

- 2) Tersedia aplikasi reu dari Kemenpan
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
- i. Monitoring Laporan LHKAN
 - 1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
 - 2) Bentuk Laporan sederhana
- j. Monitoring Zona Integritas
 - 1) Dukungan dari Pimpinan
 - 2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai
 - 3) Semangatdari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

a. Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

b. Reviu LPPD

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya mepet dan/atau telat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

1) Kompetensi belum sesuai standar

2) Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1) kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel

2) Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli

3) Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
- 2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

i. Monitoring Laporan LHKAN

- 1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

j. Monitoring Zona Integritas

- 1) Obrik telah merasa jenuh

D. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Evaluasi AKIP

- 1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
- 2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi Ketika pelaksanaan evaluasi

b. Reviu LPPD

- 1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri
- 2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun kemendagri
- 3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala2 untuk menghasilkan Solusi terbaik

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Peningkatan Kompetensi

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) Dilakukan sosialisasi secara berkala
- 2) Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

e. Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD... (hehehe biar bs nginep di hotel)
- 2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

f. Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.
- 2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

g. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

h. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

i. Monitoring Laporan LHKAN

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

j. Monitoring Zona Integritas

1) Secara berkala melakukan sosialisasi



INSPEKTUR

MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonorejo, 02 Juli 2026

PPUPD Ahli Pertama

AI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Farhan Adnan Irfandi".

FARHAN ADNAN IRFANDI, S.Tr.I.P
200105012025101001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **FREDY GUNTARA, S.H.**

Jabatan Pelapor : **PPUPD Ahli Pertama**

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**

Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	Selesai di TW I dan II
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	Selesai di TW I
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	Selesai di TW I (DISARSIPUS)
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0		0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0		0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0		0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	1 Laporan di TW I dan nanti 1 Laporan di TW III
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0		0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan II
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan I Untuk TW I dan II dilaksanakan di TW III (digabung)
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	TW I dan TW II

B. FAKTOR PENDUKUNG

a. Evaluasi AKIP

- 1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai
- 2) Pra Evaluasi dilakukan revidi atas Dokumen LkJP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
- 3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

b. Revidi LPPD

- 1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan revidi dengan agenda kerja revidi LPPD
- 2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
- 2) Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan pengawasan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
- 2) Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Komitmen Pimpinan
- 2) Suport dari pemilik risiko level Perangkat Daerah
- 3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- 2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- 3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
- 2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

i. Monitoring Laporan LHKAN

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

j. Monitoring Zona Integritas

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

a. Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

b. Reviu LPPD

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya mepet dan/atau telat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

1) Kompetensi belum sesuai standar

2) Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1) kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel

2) Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli

3) Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring
- 2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

i. Monitoring Laporan LHKAN

- 1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

j. Monitoring Zona Integritas

- 1) Obrik telah merasa jenuh

D. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Evaluasi AKIP

- 1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
- 2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi Ketika pelaksanaan evaluasi

b. Reviu LPPD

- 1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri
- 2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun kemendagri
- 3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala2 untuk menghasilkan Solusi terbaik

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Peningkatan Kompetensi

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) Dilakukan sosialisasi secara berkala
- 2) Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

e. Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD... (hehehe biar bs nginep di hotel)
- 2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

f. Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.
- 2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

g. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

h. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan**i. Monitoring Laporan LHKAN**

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

j. Monitoring Zona Integritas

1) Secara berkala melakukan sosialisasi



MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonogiri, 02 Juli 2026

PPUPD Ahli Pertama

FREDY GUNTARA, S.H.
199112132025061001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SETYAWAN ARFIANTO, S.Sos
Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Madya
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	Selesai di TW I dan II
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	Selesai di TW I
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	Selesai di TW I (DISARSIKUS)
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0		0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0		0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0		0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	1 Laporan di TW I dan nanti 1 Laporan di TW 3
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0		0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan II
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan I Untuk TW I dan II dilaksanakan di TW III (digabung)
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	TW I dan TW II

B. FAKTOR PENDUKUNG

a. Evaluasi AKIP

- 1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai
- 2) Pra Evaluasi dilakukan revidi atas Dokumen LkJIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
- 3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

b. Revidi LPPD

- 1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan revidi dengan agenda kerja revidi LPPD
- 2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
- 2) Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan pengawasan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
- 2) Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Komitmen Pimpinan
- 2) Suport dari pemilik risiko level Perangkat Daerah
- 3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- 2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- 3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
- 2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

- 2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemendagri
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

i. Monitoring Laporan LHKAN

- 1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai
- 2) Bentuk Laporan sederhana

j. Monitoring Zona Integritas

- 1) Dukungan dari Pimpinan
- 2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai
- 3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

a. Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

b. Reviu LPPD

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya mepet dan/atau telat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

1) Kompetensi belum sesuai standar

2) Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1) kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel

2) Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli

3) Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

i. Monitoring Laporan LHKAN

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

j. Monitoring Zona Integritas

1) Obrik telah merasa jenuh

D. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Evaluasi AKIP

- 1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
- 2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi Ketika pelaksanaan evaluasi

b. Reviu LPPD

- 1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri
- 2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun kemendagri
- 3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala2 untuk menghasilkan Solusi terbaik

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Peningkatan Kompetensi

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) Dilakukan sosialisasi secara berkala
- 2) Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

e. Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD... (hehehe biar bs nginep di hotel)
- 2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

f. Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.
- 2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

g. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

h. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

i. Monitoring Laporan LHKAN

- 1) Secara berkala melakukan sosialisasi

j. Monitoring Zona Integritas

- 1) Secara berkala melakukan sosialisasi



Wonogiri, 02 Juli 2026

PPUPD Ahli Madya

SETYAWAN ARFIANTO, S.Sos
197901152005011006

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIEF WULANDARI, S.P, M.P

Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Muda

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE

Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	Selesai di TW I dan II
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	Selesai di TW I
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100.00	Selesai di TW I (DISARSIPUS)
					Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2027	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	0		0.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
					Jumlah Laporan Pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan	0		0.00	
					Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Program Strategis Nasional	Laporan	0		0.00	Dihapus, diganti penugasan lainnya
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	0		0.00	
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	1 Laporan di TW 1 dan nanti 1 Laporan di TW 3
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0		0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan II
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	Triwulan I Untuk TW I dan II dilaksanakan di TW III (digabung)
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	TW I dan TW II

B. FAKTOR PENDUKUNG

a. Evaluasi AKIP

- 1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai
- 2) Pra Evaluasi dilakukan revidi atas Dokumen Lk/JIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
- 3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

b. Revidi LPPD

- 1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan revidi dengan agenda kerja revidi LPPD
- 2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Tata cara pemeriksaan telah di lengkapi Pedoman/Regulasi yang memadai
- 2) Objek Pemeriksa memberikan respon yang baik atas kegiatan pengawasan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) terdapat surat edaran instruksi dilakukan pemantauan
- 2) Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian secara berkala

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Komitmen Pimpinan
- 2) Suport dari pemilik risiko level Perangkat Daerah
- 3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

- 1) Kolaborasi / hubungan yang baik antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- 2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- 3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi
- 2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan
- 3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi revidi dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

i. Monitoring Laporan LHKAN

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

j. Monitoring Zona Integritas

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

a. Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

b. Reviu LPPD

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya mepet dan/atau telat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

1) Kompetensi belum sesuai standar

2) Objek Pemeriksanya terkadang benturan/sama dengan penugasan Tim lain sehingga terkadang batal dilaksanakan

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

1) kurang SDM yang menangani pemantauan sehingga yang di desk hanya Perangkat Daerah Sempel

2) Rencana Pengendalian Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah karena kurang peduli

3) Pelaporan hasil pemantauan tidak disertai dokumen pendukung

e. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

f. Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutama penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

g. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

h. Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh menpan sering mengalami trouble, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

i. Monitoring Laporan LHKAN

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

j. Monitoring Zona Integritas

1) Obrik telah merasa jenuh

D. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Evaluasi AKIP

- 1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi
- 2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi Ketika pelaksanaan evaluasi

b. Reviu LPPD

- 1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri
- 2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun kemendagri
- 3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala2 untuk menghasilkan Solusi terbaik

c. Pengawasan Urusan Pemerintah

- 1) Peningkatan Kompetensi

d. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RTP

- 1) Dilakukan sosialisasi secara berkala
- 2) Penandatanganan Komitmen pemilik Resiko untuk dilaksanakan rencana pengendalian

e. Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD... (hehehe biar bs nginep di hotel)
- 2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

f. Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi

- 1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.
- 2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

g. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

h. Evaluasi RB perencanaan dan pelaksanaan

- 1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu
- 2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

i. Monitoring Laporan LHKAN

- 1) Secara berkala melakukan sosialisasi

j. Monitoring Zona Integritas

- 1) Secara berkala melakukan sosialisasi

**INSPEKTUR****MARDIANTO, SE****19710124 199903 1 002****Wonogiri, 02 Juli 2026****PPUPD Ahli Muda**
ARIEF WULANDARI, S.P., M.P**198203272005012009**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: AGUSTIN RATRIANA, SE
: Auditor Ahli Madya
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	2	2	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	2	200.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	10	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Penguasaan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Revisi Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Revisi Laporan Keuangan

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 di Triwulan IV

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melanjutkan pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonogiri, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Madya

AGUSTIN RATRIANA, SE
198508222009032008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: HERY SUBYANTO, S.IP
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	2	2	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	10	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 di Triwulan IV

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Revisi Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melanjutkan pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

HERVY SUBYANTO, S.IP
197906302006041008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :
Jabatan Pelapor :
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev :
Jabatan Pimpinan Pelapor :

SUKIYATNO, S.E.
Auditor Ahli Pertama
MARDIANTO, SE
INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Revisi LKPD yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	2	2	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	10	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 di Triwulan IV

Revisi Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Revisi Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait revisi laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melanjutkan pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

SAKRYATNO, S.E.
197409112009011005

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Revisi LKPD yang disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	2	2	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	10	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II
Reviu Laporan Keuangan
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
Kerjasama Pengawasan Internal
Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Penguasaan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, akan dilaksanakan Asistensi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 di Triwulan IV

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melanjutkan pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonorejo, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak
199912172022032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: NENI SAPTANINGRUM, S.Sos
: Auditor Ahli Madya
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Rasarnya Kegiatan Aisara	Indikator	Kinerja							
			No	Rasarnya Kinerja	Indikator Kinerja	Setara	Target Triwulan 2	Rendasi	(%)	Retarsugan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Terusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Terusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	5	Terusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	5	5	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Percepatan pelaksanaan pengawasan kinerja berupa Audit Kinerja Lintas Sektoral yang semula direncanakan Audit Eksternal guna penilaian Kapabilitas APSP.

Revisi Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2025 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2025.

Pengawasan Desa :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan II.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja dapat dilaksanakan di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan berlanjut di triwulan III untuk Audit Rinci

Berita Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan Triwulan III untuk Audit Rinci.

Revisi Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP sesuai sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026



Wonogiri, 01 Juli 2026

Auditor Ahli Madya

Neni
NENI SAPTANINGRUM, S.Sos
197104061998032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: AGUS PRIYANTI, A.Md
: Auditor Penyelia
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE-2

No	Rincian Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Rincian Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Terusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keopaktatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Terusunnya Laporan Telah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	5	Terusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	5	5	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Percepatan pelaksanaan pengawasan kinerja berupa Audit Kinerja Lintas Sektoral yang semula direncanakan Audit Ketastan guna penilaian Kapabilitas APUP.

Revisi Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026.

Pengawasan Desa :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Terlaksana Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan II.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja dapat dilaksanakan di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan berlanjut di triwulan III untuk Audit Rinci Revisi Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tidak lanjut hasil pengawasan di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan Triwulan III untuk Audit Rinci.

Revisi Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP sesuai sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.



Wonogiri, 01 Juli 2026

Auditor Penyelia

AGUS PRIYANTI, A.Md
198108132011012004

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: DICKY SATRIA, S.E.
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE-2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100,00	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Terusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100,00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100,00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Terusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0,00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP	5	Terusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	5	5	100,00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	5	5	100,00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : Percepatan pelaksanaan pengawasan kinerja berupa Audit Kinerja Lintas Sektoral yang semula direncanakan Audit Ketetapan guna penilaian Kapabilitas APFIP. Revisi Laporan Kinerja : Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026 Pengawasan Desa : Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya Telaah Intern Antar Bidang : Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan : Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan II. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
--

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja dapat dilaksanakan di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan berlanjut di triwulan III untuk Audit Rinci Revisi Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan Triwulan III untuk Audit Rinci.

Revisi Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.



Wonogiri, 01 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

DICKY SATRIA, S.E.
199304142020121002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: RINI SETYA HASTUTI, A.Md
: Pranata Komputer Mahir
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Tersusunnya Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Kegiatan UPG	Laporan	2	2	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Aset	Laporan	1	1	100.00	
			3	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	100.00	
			4	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	100.00	
5	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	
6	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	
7	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	2	100.00	
8	IKM Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi
Dukungan pimpinan dan tersedianya admin UPG dalam pelaksanaan kegiatan UPG di Inspektorat, serta adanya laporan dari pegawai/ASN/pihak terkait yang menerima atau mengetahui adanya gratifikasi

Laporan Aset

Tersedianya data dan dokumen administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara lengkap dan tepat waktu dari pengurus barang

Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya anggaran sehingga pemeliharaan BMD dapat dilaksanakan pada Triwulan II

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Ketersediaan data dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMD Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2026

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya anggaran dan koordinasi yang baik sehingga pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi 1 paket pada Triwulan II

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan atas Peralatan dan Perlengkapan Kantor di tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya seperti laptop dan printer

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sampai dengan Triwulan II, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target yang direncanakan dapat tercapai

Laporan Aset

Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penyusunan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD pada Triwulan II

Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD

Tidak terdapat hambatan yang signifikan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Ketersediaan data dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMD Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2026

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat berjalan dengan lancar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan II Tahun 2026

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Melanjutkan pelaksanaan kegiatan UPG di Triwulan III

Laporan Aset

Meningkatkan koordinasi dengan pengurus barang guna mendukung penyusunan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD secara tepat waktu dan akurat pada Triwulan III

Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD

Melanjutkan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD secara berkala di Triwulan III

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Melanjutkan pelaksanaan rekonsiliasi atas Triwulan II di Triwulan III

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Melanjutkan pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor secara berkala di Triwulan III

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Triwulan III Tahun 2026



Wonogiri, 02 Juli 2026

Franata Komputer Mahir

RINI SETYA HASTUTI, A.Md
198110262010012015

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja	: FITRI LESTARI, S.Kom
Jabatan Pelapor	: Pranata Komputer Mahir
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev	: MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor	: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Tersusunnya Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	12	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Tersusunnya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	2	2	100.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Tersusunnya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan data dan koordinasi dengan bawahan terkait Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Ketersediaan data dan dokumen terkait Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai atas SKP Triwulan IV Tahun 2025 (di Triwulan I) dan SKP Triwulan I Tahun 2026 (di Triwulan II) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Ketersediaan data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai dengan Triwulan II dapat berjalan lancar

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pelaksanaan yang rutin sehingga belum ada faktor penghambat yang krusial yang dapat menghambat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian selama ini

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam proses Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 atas kinerja pegawai di Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penugasan mandatori di luar perencanaan sehingga terkadang mengakibatkan pegawai terkait yang telah direncanakan pelatihannya menjadi dibatalkan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Melanjutkan pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM di Triwulan III Tahun 2026

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Melanjutkan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan III atas kinerja pegawai Triwulan II Tahun 2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai rencana dalam data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 untuk Triwulan III Tahun 2026



Wonogiri, 02 Juli 2026

Pranata Komputer Mahir

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FITRI LESTARI".

FITRI LESTARI, S.Kom

198307122010012031

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja	: NINDA SARASWATI, A.Md.Kom
Jabatan Pelapor	: Pranata Komputer Terampil
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev	: MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor	: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Tersusunnya Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	0	0	0.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Ketersediaan data arsip aktif dan inaktif

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pembentukan tim pelaksana SPBE dan arahan pimpinan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Tidak ada faktor penghambat karena belum ada pelaksanaan atas Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Terjadi perubahan regulasi dari SPBE menjadi Pemdi sehingga menghambat waktu pengerjaan karena harus mempelajari konsep yang baru dalam penyusunan arsitektur SPBE menjadi arsitektur Pemdi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tidak ada faktor penghambat yang krusial

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Triwulan IV Tahun 2026 sesuai yang direncanakan

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Melanjutkan pelaksanaan penilalan mandiri evaluasi kinerja Pendi di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Triwulan III Tahun 2026



Wonogiri, 02 Juli 2026

Pranata Komputer Terampil

NINDA SARASWATI, A.Md.Kom
199710052025062002

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MUTHIA NOOR SHAFI, S.E.
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	1	0	0.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	0	3	0.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	7	7	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan II sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian pengawasan kinerja atas audit kinerja lintas sektoral terkait program kesehatan gratis sehingga pelaksanaan atas 1 pengawasan desa yang direncanakan masuk Triwulan II ditunda dan dilanjutkan pelaksanaannya di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 belum ada rencana pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi *real* jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi *real* jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 02 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

A blue ink signature of Muthia Noor Shafa, S.E.

MUTHIA NOOR SHAFI, S.E.
199908032025062005

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ALFI FAJRAN MUKTI, S.H.
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	9	90.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga tidak ada realisasi di Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial meskipun adanya perubahan PKPT, sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun dikarenakan belum adanya permintaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Reviu HPS Pengadaan Kain Seragam untuk SD dan TK/PAUD, serta Reviu Kontrak DAK Bidang Jalan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan adanya pembahasan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, maka pelaksanaan pengawasan akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

A handwritten signature in blue ink, belonging to Alfi Fajrian Mukti, S.H.

ALFI FAJRIAN MUKTI, S.H.
199809262025062002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: GUSTINA DWI LESTIANI, S.Ak.
: Auditor Ahli Pertama
: MARDIANTO, SE
: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE-2

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Masukan Kinerja	Indikator Kinerja	Sasaran	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Terusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	2	Terusunnya Laporan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Terusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Terusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	5	Terusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Terusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	5	5	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Percepatan pelaksanaan pengawasan kinerja berupa Audit Kinerja Lintas Sektoral yang semula direncanakan Audit Ketertarikan guna penilaian Kapabilitas APUP.

Revisi Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengikat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026

Pengawasan Desa :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan II.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :**

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja dapat dilaksanakan di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan berlanjut di triwulan III untuk Audit Rinci serta Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Desa :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan II untuk Audit Pendahuluan dan Triwulan III untuk Audit Rinci.

Revisi Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan revisi antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026



Wonogiri, 01 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

GUSTINA DWI LESTIANI, S.Ak.
199806292025062004

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : PAMELA DEVI CAHYARINI, S.Ak.
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasannya	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	9	90.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga tidak ada realisasi di Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial meskipun adanya perubahan PKPT, sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun dikarenakan belum adanya permintaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Reviu HPS Pengadaan Kain Seragam untuk SD dan TK/PAUD, serta Reviu Kontrak DAK Bidang Jalan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan adanya pembahasan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, maka pelaksanaan pengawasan akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

PAMELA DEVI CAHYARINI, S.Ak.
199703122020122007

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md
 Jabatan Pelapor : Auditor Penyelia
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	9	90.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga tidak ada realisasi di Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial meskipun adanya perubahan PKPT, sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun dikarenakan belum adanya permintaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Reviu HPS Pengadaan Kain Seragam untuk SD dan TK/PAUD, serta Reviu Kontrak DAK Bidang Jalan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan adanya pembahasan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, maka pelaksanaan pengawasan akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III


INSPEKTUR
MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Penyelia

JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md
197605042011011003

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : E.EKO KRISTIYANTO,S.IP
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Madya
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	9	90.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga tidak ada realisasi di Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial meskipun adanya perubahan PKPT, sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun dikarenakan belum adanya permintaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Reviu HPS Pengadaan Kain Seragam untuk SD dan TK/PAUD, serta Reviu Kontrak DAK Bidang Jalan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan adanya pembahasan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, maka pelaksanaan pengawasan akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Ahli Madya

E.EKO KRISTİYANTO, S.IP
196707211990031005

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FARIDA ISMI TRI HAPSARI, S.H.
 Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Pertama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	10	9	90.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga tidak ada realisasi di Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial meskipun adanya perubahan PKPT, sehingga pengawasan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan PKPT Triwulan II tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dilaksanakan dari Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun dikarenakan belum adanya permintaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Reviu HPS Pengadaan Kain Seragam untuk SD dan TK/PAUD, serta Reviu Kontrak DAK Bidang Jalan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan adanya pembahasan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, maka pelaksanaan pengawasan akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja

Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026

Pengawasan Desa

Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Tim

Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III



Wonogiri, 06 Juli 2026

PPUPD Ahli Pertama

FARIDA ISMI TRI HAPSARI, S.H.
199401142025062002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: LASTO PAMUNGKAS
: Pengelola Umum Operasional
: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Melayani antar jemput pegawai dan melayani transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Laporan	6	6	100.00	
			2	Memeriksa dan menyiapkan perangkat kendaraan dinas agar selalu siap pakai	Kendaraan dinas yang selalu siap pakai	Laporan	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan beberapa faktor pendukungnya :

- Ketersediaan kendaraan dinas dalam kondisi operasional yang baik.
- Jadwal kegiatan kedinasan relatif terencana sehingga penggunaan kendaraan dapat diatur.
- Dukungan pengemudi (driver) yang disiplin dan memahami rute serta kebutuhan pelayanan.
- Ketersediaan anggaran operasional (BBM dan pemeliharaan ringan) yang mencukupi.
- Koordinasi internal yang berjalan baik antar bagian pengguna kendaraan.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan faktor pendukungnya :

- Pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan (servis berkala).
- Kedisiplinan pengemudi dalam merawat kendaraan setelah digunakan.
- Ketersediaan anggaran pemeliharaan kendaraan.
- Kebiasaan pemeriksaan kendaraan secara berkala.
- Dukungan administrasi dalam pencatatan kondisi kendaraan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan beberapa faktor penghamatnya :

- Potensi benturan jadwal penggunaan kendaraan jika kegiatan meningkat.
- Keterbatasan jumlah kendaraan dibanding kebutuhan pada waktu tertentu.
- Risiko gangguan teknis kendaraan secara tiba-tiba.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan faktor penghamatnya :

- Usia kendaraan yang sudah tua berpotensi mengalami kerusakan.
- Keterbatasan waktu untuk perawatan jika kendaraan sering digunakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan tindak lanjutnya :

- Menyusun dan memperketat sistem penjadwalan kendaraan dinas.
- Melakukan pengecekan rutin kendaraan sebelum digunakan (pre-check).
- Menyusun skala prioritas penggunaan kendaraan untuk kegiatan kedinasan.
- Mengoptimalkan koordinasi antar pengguna kendaraan melalui administrasi peminjaman.
- Mengantisipasi kebutuhan tambahan kendaraan (jika diperlukan) melalui perencanaan ke depan.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan tindak lanjutnya :

- Menjadwalkan servis berkala secara konsisten sesuai standar.
- Melakukan pemeriksaan harian/mingguan terhadap kondisi kendaraan.
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penggantian kendaraan.
- Meningkatkan kedisiplinan penggunaan kendaraan sesuai prosedur.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

Wonogiri, 02 Juli 2026

Pengelola Umum Operasional

LASTO RAMUNGKAS
197512142025211016

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : Ir.MOH.RIFAI, M.Si.
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Utama
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	10	10	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	4	4	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	6	6	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	15	15	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan II Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.



Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Ahli Utama

Ir. MOH. RIFAI, M.Si.
196408081990031007

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si
 Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Muda
 Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
 Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	8	8	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan II Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.



INSPEKTUR

MARDIANTO, SE
19710124 199903 1 002

Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Ahli Muda

YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si
198007312009032007

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja	: RIZA YOGA SUSANTO, S.E.
Jabatan Pelapor	: Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev	: MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor	: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	8	8	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan II Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.



Wonogiri, 06 Juli 2026

Auditor Ahli Pertama

RIZA YOGA SUSANTO, S.E.
199703262020121005

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026**

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja :
Jabatan Pelapor :
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev :
Jabatan Pimpinan Pelapor :

FARRIKA KUSFANDARU, S.T.
Auditor Ahli Pertama
MARDIANTO, SE
INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -2

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	7	7	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan II Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan II sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan II Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan II dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan III.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.



Wonogiri, 06 Juli 2026 -

Auditor Ahli Pertama

FARRIKA KUSFANDARU, S.T.
199606082025062002